BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, teori praktik sosial mampu diaplikasikan dalam konteks manajemen krisis pariwisata. Hal ini terlihat dari analisis data terkait pelaksanaan manajemen krisis pariwisata yang dilakukan di Kawasan Wisata Kabupaten Bogor. Terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola krisis pandemi, hal ini dikarenakan pemerintah harus bisa melihat setiap kasus yang terjadi dari sisi materi, kompetensi dan makna yang ada. Seperti halnya memberikan fasilitas yang diperlukan, pembuatan kebijakan yang efektif, mengembangkan *skill* yang diperlukan, melihat respon masyarakat atas kebijakan yang dibuat dan sebagainya. Pemerintah daerah yang paling banyak dibicarakan di media antara lain Bupati Bogor, Satgas COVID-19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dan Polres Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menerapkan manajemen krisis pariwisata yang efektif di kawasan wisatanya. Dari sisi materi, kompetensi dan pemahaman makna pemerintah sudah memberikan usaha terbaik agar kegiatan wisata tetap bisa bergerak di masa pandemi. Segala kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini sudah dilakukan juga seperti penelitian terdahulu terkait krisis pariwisata. Seperti terlibat dalam pengambilan keputusan, melakukan usaha pemasaran, penerapan keselamatan wisatawan, bekerjasama dengan media massa, dan sebagainya. Namun terlihat bahwa pemberitaan di media masih didominasi oleh daerah Puncak Bogor, sehingga daerah wisata lain belum begitu tersebar informasinya.

Hasil analisis data didominasi oleh dimensi materi yang menjelaskan bahwa diperlukan praktik untuk mengelola krisis pariwisata yang terdiri dari *Assessments*, *Training*, *Certification*, *Facilities/Equipment* dan *Testing*. Materi mempunyai nilai persentase 65% dari seluruh berita yang dianalisis. Hal ini menjelaskan bahwa produksi media massa *online* mengedepankan informasi terkait hal-hal diatas

Kompetensi merupakan praktik yang selanjutnya banyak dibahas dalam media massa *online*. Kompetensi memiliki nilai persentase sebesar 30% dari seluruh data yang dianalisis. Kompetensi mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan praktik. Praktik kompetensi yang diperlukan dalam mengelola krisis pariwisata antara lain *Communication*, *Plans Creation*, *Structure*, *Team Work*, *Functional Skills* dan *Psychological Resistance*. Seluruh praktik tersebut terkandung dalam informasi yang berada di media massa *online*, namun kuantitasnya tidak sebanyak materi.

Makna merupakan bagian dari praktik sosial yang dibahas dalam berita, namun memiliki kuantitas yang paling sedikit yaitu 5%. Dimensi ini merupakan praktik yang memberi makna pada individu seperti alasan untuk terlibat di dalamnya, dan bisa terkandung dalam kategori seperti *Behavioral, Cognitive, Emotional, Physical, Relation* dan *Spiritual*. Makna dalam penelitian ini menceritakan tentang bagaimana wisatawan, pelaku usaha wisata ataupun pemerintah memaknai krisis pandemi COVID-19 ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh media massa *online*.

5.2 Implikasi

Sebagai penelitian yang membahas peran pemerintah daerah dalam menangani krisis pandemi COVID-19 di bidang pariwisata, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu terkait teori praktik sosial dan manajemen krisis pariwisata. Penelitian ini dapat memperlihatkan tema dan menjabarkan bagaimana manajemen krisis pariwisata dari kacamata teori praktik sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan keberlangsungan pariwisatanya di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan berbagai pihak yang terkait dalam mengambil atau menyusun suatu kebijakan dalam menangani krisis.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa hal yang dapat membantu pengelolaan krisis pada Kawasan Wisata di Kabupaten Bogor. Rekomendasi yang diberikan antara lain melakukan penilaian serta evaluasi pada daya tarik wisata di Kabupaten Bogor selain wilayah puncak

dan mengangkatnya di media. Wilayah Puncak Bogor termasuk daya tarik wisata yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bogor, namun sejatinya Kabupaten Bogor terdiri dari berbagai destinasi yang sama-sama berpotensi untuk dikembangkan. Maka dari itu perlu adanya fokus dari pemerintah terhadap hal ini demi mempercepat proses pemulihan pariwisata di kawasan wisata ini.

Rekomendasi lain yang bisa peneliti berikan antara lain, tingkatkan koordinasi dengan para pelaku usaha wisata maupun wisatawan di Kabupaten Bogor. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan ataupun peraturan baru terkait berwisata di era *new normal*, terkadang informasinya tidak sepenuhnya sampai kepada pihak-pihak terkait, hal ini menyebabkan banyaknya *miscommunication* antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus gencar menebar informasi baru melalui berbagai *platform* sosial media ataupun surat kabar, baik instagram pemerintah daerah, instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dan media media lain yang sekiranya dapat tersalurkan kepada masyarakat.